



Pembahasan Raperda Jamkes Diprioritaskan

YOGYAKARTA — Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mendesak agar rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan dapat dibahas di luar Program Legislasi Daerah 2011. Dengan begitu, pengesahannya dapat dilakukan pada akhir tahun ini.

"Kami akan menyerahkan rekomendasi agar rancangan peraturan daerah (Raperda) ini dapat dibahas sebagai Raperda di luar Prolegda," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Ali Fahmi, di Yogyakarta, Selasa (26/4).

Menurut dia, Raperda tersebut tidak harus menjadi Raperda inisiatif dari legislatif, namun juga bisa menjadi Raperda yang diusung oleh eksekutif. Sehingga kedua pihak tersebut kini terus melakukan pembahasan intensif dalam penyusunannya.

Ali mengatakan, penyusunan Raperda Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (Bapel Jamkes) tersebut adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mensyaratkan adanya badan pelaksana untuk menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan daerah.

"Setelah Perda tersebut disahkan, maka UPT (Unit Pelayanan Teknis) Jamkesda yang selama ini memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat akan berubah bentuk menjadi badan," ujar dia, seperti dikutip *Antara*.

Lebih jauh Ali menambahkan, dengan berubah menjadi badan, maka penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada masyarakat dapat diperluas. Yaitu tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kartu menuju sejahtera (KMS), tetapi kepada seluruh masyarakat.

Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menilai, pelayanan jaminan kesehatan yang selama ini dilakukan UPT Jamkesda kepada masyarakat belum maksimal, dan cenderung berbelit sehingga menyulitkan masyarakat.

"Diharapkan, dengan berubah menjadi badan pelayanan, maka pelayanan dapat diberikan secara maksimal, dan seluruh masyarakat dapat menikmati jaminan kesehatan ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Choirul Anwar menyatakan, perubahan status UPT menjadi Badan Pelayanan sangat diperlukan karena tugas yang dikerjakan akan semakin berat, seperti mengelola iuran kesehatan dari masyarakat.

Pemerintah berencana menyelenggarakan jaminan kesehatan yang menyasar seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, salah satunya dengan menarik iuran dari masyarakat. "Setelah ditelaah, maka bentuk badan pelaksana adalah bentuk yang terbaik," katanya.

Saat ini, UPT Jamkesda hanya memberikan pelayanan jaminan kesehatan untuk masyarakat yang telah memiliki KMS, sehingga perlu diubah menjadi Badan Pelaksana agar mampu mengelola tugas yang lebih luas. ■ ed : yusuf assidiq

Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Dinas Kesehatan			
4. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005